


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Secara universal, Schumpeter mengemukakan bahwa demokrasi ialah kehendak rakyat dan kebaikan bersama.¹ Henry B. Mayo menyatakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan legislatif berdasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Ditemukan ada korelasi positif antara demokrasi lokal dengan level budaya politik, ada atau tidaknya demokrasi lokal, tergantung pada budaya politik mampu mendorong proses pelaksanaannya².

Menurut Almond dan Verba sebagaimana dikutip Chilcote, budaya politik merupakan orientasi politik dan sikap-sikap yang dipegang individu-individu dalam berhubungan dengan sistem politik mereka, yang kemudian menjadi agregat pada tingkat kolektif. Pye menyatakan bahwa budaya politik³ merupakan metode kerja dari hal-hal terpendam psikologi individual yang kompleks hingga ke tingkat agregat sosial.

¹, Yuwanto, Arif Sofianto, *Kontribusi Budaya Politik Lokal Dalam Demokratisasi (Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)* Tanpa Tahun Terbit dan Penerbit, hal 1

²*Ibid.*, hal 2

³, Yuwanto, Arif Sofianto., *Ibid*, hal 1

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara⁴, dan perilaku masyarakat yang berupa partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Masyarakat dalam melakukan kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi, kehidupan pribadi, dan sosial secara luas.

Budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. Budaya politik juga terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatar belakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi. Orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak mereka melakukan pemberian suara *voting behavior*, dengan cara ikut serta partisipasi secara langsung untuk memilih wakil rakyat di daerahnya dalam pemilihan umum. Sedangkan perilaku memilih merupakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk menentukan dan memilih salah satu calon dari kontestan politik yaitu calon legislatif.

Secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruh dan mereka yakinkan agar

⁴ Sumartono, Budaya Politik Dalam Masyarakat yang Pragmatis, (Padang : Universitas Ekasakti, 2018), Vol, 2 (1)

mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Firmanzah, 2007: 87). Dinyatakan sebagai pemilih dalam pemilu yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih (Pasal 69 ayat 1 UUU No. 23 Tahun 2014). Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik yang nantinya dapat dijadikan sebagai sarana untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik, misalnya menjadi anggota atau menjadi kader dari partai politik tertentu.

Jika dikaji dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut: (a) Budaya Politik Parokial (*parochial political culture*) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan aktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah) menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil. Karena wilayah yang terbatas pelaku politik sering memainkan peranannya seiring dengan diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik yang bersikap bebas dan berdiri sendiri, yang menonjol dalam budaya politik. (b) Budaya Politik Kaula (*subyek political culture*) yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. Anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor

dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu menyerah saja pada kepada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan; (c) Budaya Politik Partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi⁵.

Penelitian mengenai budaya politik sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Imam Muttaqin⁶, Munadi⁷, Budi Mulyawan⁸, Randy Pranata Putra⁹. Penelitian ini berjudul Budaya Politik Orang Rimba Di Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi. Temuan pada penelitian ini yaitu nilai-nilai budaya yang dianut oleh orang rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas didominasi oleh kepentingan adat istiadat, konflik yang terjadi antara Orang Rimba dengan PT. Wana Perintis disebabkan oleh pembukaan lahan dipemukiman Orang Rimba yang secara keyakinan adat merupakan tanah


⁵ Adil Amin, 2015, Budaya Politik, Pemilu Pemula (Studi Analisis Budaya Politik Pemula Mahasiswa Universitas Sumatra Utara, Laporan Akhir Pelaksanaan PNBPU USU Tahun Anggaran 2014, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2015)al 19

⁶ Untuk Lebih lanjut lihat Kurnia Imam Muttaqin,2016, *Budaya Politik Orang Rimba Di Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi*,Skripsi,Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung,

⁷,Munadi, 2014, Budaya Politik Masyarakat Samin (SEDULURISKEP) Studi kasus di Dukuh Mbombong Desa Batu Rejo Kecamatan sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 4, No 1, Hal 4

⁸ Budi Mulyawan,2015, Budaya Politik Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Politik, *Jurnal Aspirasi*, Vol 5 No 2,Hal 6,

ulayat bagi kelompok Orang Rimba tersebut. Dari konflik yang terjadi, Imam Muttaqim mencoba melihat bagaimana budaya politik yang terjadi di lingkungan Orang Rimba setelah terjadinya konflik tersebut.



Tipe budaya politik yang ditemukan oleh Kurnia Imam yaitu, (1) Kognitif, orang rimba memiliki harapan yang terbatas terhadap sistem politik, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) Afektif, orang rimba memiliki kesadaran bahwasanya dia tidak melawan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu legalitas yang diberikan kepada PT. Wana Perintis untuk membuka lahan perkebunan, sehingga masyarakat hanya bisa pasrah dan percaya akan perbaikan ekonomi yang dijanjikan, walaupun dilain sisi Orang rimba kehilangan lahan pemukiman dan perkebunan, (3) evaluative, orang rimba menganggap suatu kesalahan yang dibuat oleh masyarakat luar menjadi suatu yang tidak wajar, ini disebabkan oleh mereka terdidik, sedangkan sebaliknya bagi masyarakat Orang Rimba.

Penelitian ini didasari oleh kemunculan masyarakat Samin yang tergolong kedalam etnik yang memiliki kekhasan santun dan religi yang apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini sangat bentrok dengan keyakinan masyarakat Samin. Kekhasan masyarakat Samin terdiri dari ajaran hidup yang turun temurun dari nenek moyang. Seperti *dukuh, mbombong, kudu weruh te'e dhewe, lugu, lan mligi*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara sederhana masyarakat Samin tergolong kedalam

⁹ Pengaruh Orientasi Politik Terhadap Budaya Politik Masyarakat Multi Etnis di Kabupaten Pasaman Barat Pada Pilkada Tahun 2018, Skripsi, (Padang : Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas,2018)

kategori kebudayaan subyek parokial, dimana tipe ini campuran antara budaya politik parokial dan tipe budaya politik subyek. Masyarakat Samin dalam berperilaku politik dipengaruhi oleh aspek-aspek budaya yang berkembang dan diyakini oleh nenek moyang secara turun-menurun sampai saat ini. Bentuk demokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kekuatan budaya lebih memberikan pengaruh yang signifikan kepada masyarakat Samin dalam bertindak dan bersikap. Dengan demikian Munadi menggolongkan masyarakat Samin sebagai masyarakat yang tergolong dalam subjek parokial

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perubahan budaya politik yang terjadi di era reformasi. Penelitian ini mendapatkan temuan yang sangat menarik dimana kajian mengenai perubahan budaya politik tidak terjadi pada era reformasi. Walaupun secara historis pelembagaan formal sistem politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Hal ini didasari bahwasanya suatu kebudayaan berdasarkan hukum-hukum perkembangan masyarakat berjalan relative lebih lambat.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pasaman pada Pilkada Tahun 2015. Kabupaten Pasaman merupakan masyarakat yang multi etnis yang terdiri dari masyarakat Minang, Jawa dan Mandailing. Peneliti ini ingin melihat bagaimana bentuk budaya politik yang berkembang pada pilkada tahun 2015 yang disebabkan oleh munculnya kandidat-kandidat dari masing-masing etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat multi etnis pada kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 memiliki orientasi politik yang cukup tinggi atau masih tergolong

dalam kategori sedang. Dengan bentuk budaya politik subyek ini dinilai dari indikator masing-masing etnis secara umum sudah mulai memiliki tingkat pengetahuan pemahaman keyakinan sikap dan ketertarikan terhadap aktifitas politik meskipun sifatnya masih terbatas dan cenderung didorong oleh perasaan emosional atau sentiment etnisitas dengan pasangan calon. Untuk lebih lanjut lihat Randy Pranata Putra. 2018¹⁰.

Penelitian mereka lebih difokuskan pada masyarakat asli yang menetap di kawasan tertentu baik masyarakat modern maupun masyarakat terbelakang seperti suku orang rimba. Tidak banyak penjelasan yang diberikan para penelitian sebelumnya tentang budaya politik masyarakat diaspora yang menetap di suatu kawasan yang berintegrasi dengan penduduk asli seperti komunitas masyarakat Etnis Nias yang bermukim di Teluk Kabung Padang. Sebagai gejala sosial politik, diaspora tidak saja terjadi secara fisik dan material, tetapi juga budaya dan politik. Kendati tetap melestarikan budaya asal, para migran biasanya melakukan asimilasi dan akulturasi dengan budaya masyarakat di tempat baru untuk melahirkan budaya baru, termasuk budaya politik mereka. Dalam perspektif diaspora, sedikitnya ada tiga pihak yang terlibat dalam arus perubahan budaya politik. Pertama, pelakunya sendiri. Kedua, tempat baru yang dituju. Ketiga, generasi penerusnya. Konsep ini mengandung implikasi bahwa acuan terhadap budaya politik di tempat baru masih tetap relevan, walau besar kemungkinan secara terus menerus diproses dan berubah

¹⁰ Randy Pranata Putra, Budaya Politik Masyarakat Multi Etnis Kabupaten Pasaman Barat pada Pilkada di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015, Skripsi, (Padang : Universitas Andalas, 2019)

sesuai dinamika yang terjadi di tempat baru. Namun demikian, diaspora akan menampakkan komunitas budaya baru yang berbeda dengan komunitas budaya lain.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana budaya dalam komunitas diaspora yang terlihat dalam berbagai pola perilaku politik, yang membentuk orientasi politik atau apa yang disebut Almond dan Verba sebagai budaya politik dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu.¹¹ Penjelasan tentang budaya politik Etnis Nias yang bermukim di Bungus Teluk Kabung Selatan sebagai komunitas diaspora merupakan kontribusi penting penelitian ini terhadap area kajian budaya politik yang jarang mendapat perhatian di antara peneliti Ilmu Politik. Penelitian ini akan mencoba melihat pola perilaku masyarakat Etnis Nias Teluk Kabung Selatan dengan lebih mendalam. Selain kebaruan dari sisi teoritik, penelitian ini juga menunjukkan kebaruan dari sisi metodologis yaitu dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam mengkaji budaya politik yang umumnya dikaji oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang membahas secara spesifik di daerah Bungus Teluk Kabung Selatan untuk mengkaji secara spesifik budaya politik masyarakat nias, khususnya yang bermukim di daerah tersebut. Pendekatan ini melihat bagaimana berjalannya suatu budaya politik dan peneliti tidak membawa identitasnya atau ikut serta dalam budaya dan keseharian komunitas diaspora Nias di Teluk Kabung Selatan.

¹¹ James P, Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997) hal 5

1.2 Rumusan Masalah

Masyarakat Nias adalah salah satu masyarakat plural yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Suku Nias merupakan sekelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias. Suku ini telah banyak melakukan migrasi ke berbagai wilayah seperti, Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Medan, Padang dan lain sebagainya. Migrasi suku Nias termasuk pendatang paling awal yang menghuni Kota Padang setelah suku Minangkabau. Konon mereka telah sampai ke Padang sejak zaman kejayaan Aceh di abad ke-16. Seperti yang peneliti temukan, jumlah warga Nias yang terdapat di Kota Padang berjumlah kurang lebih 150.000 jiwa.

Kedatangan Suku Nias ke Padang dibawa oleh para pedagang Belanda atau VOC guna untuk dijadikan sebagai budak dan membuka lahan-lahan yang masih kosong di Padang, kemudian ada juga sebagian dari mereka yang diperkerjakan di pelabuhan.¹²Pada umumnya para migran mengakui bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi alasan mereka untuk bermigrasi, dorongan tersebut diantaranya adalah rendahnya tingkat penghasilan, sulitnya lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih belum ada sumber informasi yang pasti tentang asal-usul masyarakat

12, Mimi Citra Sari, Isjoni Tugiman, Migrasi Suku Nias Ke Kota Padang Sumatera Barat (Studi Kasus di Kecamatan Padang Selatan), 2015 Vol 2, No 2 (2015), hal 2

Nias yang sebenarnya. Salah satu suku bangsa mayoritas yang ada dalam masyarakat Nias adalah Suku Nias. Namun menjadi tersebar di beberapa daerah di Indonesia.¹³

Penelitian ini jika dilihat dari penelitian lainnya yang membahas budaya politik dan etnis lebih kepada perbandingan antar etnis maupun etnis berbeda atau sesama etnis di daerah lain. Sedangkan penelitian ini lebih terkhusus kepada satu etnis di daerah yang sama dengan primordialisme yang ada di daerah tersebut. Dengan melihat bagaimana proses budaya yang dilihat dari masyarakat marginal dan yang sudah terbawa arus modernisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus agar peneliti melihat secara langsung ke lapangan bagaimana pola kehidupan masyarakatnya. Bungus Teluk Kabung Selatan peneliti juga ingin melihat bagaimana pola hidup masyarakat Nias itu sendiri terkecuali kepada masyarakat yang sudah bisa dikatakan maju. Karna hal itu tidak terlalu menjadi hal yang unik. Ini alasan peneliti lebih fokus kepada daerah Bungus Teluk Kabung Selatan sebab dari beberapa jumlah KK pada 1 TPS mayoritasnya adalah orang nias. Dan pola kehidupan masyarakat Nias di Teluk Kabung Selatan sangat berbeda dengan Etnis Nias yang ada di sekitar Kota Padang.

Dengan menggunakan pendekatan ini maka suatu penelitian tentang masyarakat Etnis Minoritas Nias bisa lebih mendalam untuk kajian proses budaya politik. Namun hal ini akan seketika berubah jika sudah menuju ke lapangan dengan

¹³Sri Suwartiningsih dan David Samiyono, Kearifan lokal masyarakat nias dalam mempertahankan harmoni sosial, (Universitas Kristen Satya Wacana : Societas dei, 2014) Vol.1 (1)

mencoba melihat dari bagaimana pandangan menurut pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ingin melihat bagaimana bentuk dari masyarakat yang merespon suatu budaya politik. Peneliti melihat lebih dalam lagi hal-hal yang akan di temui di lapangan lalu nantinya akan menjadi daya tarik sendiri untuk fakta yang lebih kongret. Sebab penelitian ini akan coba melihat apakah benar Budaya Politik Parokial hanya masyarakat tradisional yang memiliki partisipasi rendah.

Tabel 1.1
Tabel Data Pemilih Tetap
Masyarakat Bungus Teluk Kabung Selatan.

TPS	Jumlah Masyarakat
002	294
003	269
004	286
005	175

Sumber Data : KPU Kota Padang, Tahun 2019

Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana budaya politik dalam hubungannya dengan Perilaku Memilih Masyarakat Nias Teluk Kabung Selatan dalam Pemilihan Legislatif April 2019 lalu. Pada DPT yang ada di masyarakat Nias Teluk kabung khusus TPS 005 terdapat Etnis Nias yang bisa dikatakan tidak menggunakan hal politiknya sebab lebih memilih untuk menutup diri. Hal ini yang menjadi ada sebuah nilai tersendiri sesuai dengan pengelompokan dari tipe budaya politik. Adapun nama yang terdaftar dalam DPT yang terkhusus pada TPS 05 terdapat sebanyak 147 masyarakat Etnis Nias Teluk Kabung Selatan sebagai Pemilih Tetap. Yaitu dari 175 orang 84% nya merupakan masyarakat Etnis Nias yang terdaftar di dalam DPT pada

pemilu 2019. Di TPS 005 dari 67 KK terdapat 60 KK yang beretnisikan masyarakat Nias.

Penelitian ini jika dilihat dari penelitian lainnya yang membahas budaya politik dan etnis lebih kepada perbandingan antar etnis maupun etnis berbeda atau sesama etnis di daerah lain. Sedangkan penelitian ini lebih terkhusus kepada satu etnis di daerah yang sama dengan primordialisme yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan terhadap latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah atau fokus didalam penelitian ini adalah :

Bagaimana budaya politik masyarakat Etnis Nias Teluk Kabung pada Pemilihan Legislatif 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah mendeskripsikan budaya politik masyarakat Etnis Nias Teluk Kabung Selatan pada Pemilihan legislatif Tahun 2019.

1.1 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Politik khususnya dalam kajian yang terkait dengan Budaya Politik masyarakat diaspora. Oleh karenanya,



kajian terkait Budaya Politik ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan maupun tanggung jawab dalam mempengaruhi budaya politiknya.

